



Imbas Efisiensi Anggaran, KPU Bantul Tak Lagi Pakai Mobil Dinas

BANTUL, TRIBUN - Kebijakan efisiensi anggaran belanja tahun 2025 berdampak besar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul. Pada tahun ini, KPU Bantul hanya mendapatkan anggaran untuk honor staf dan operasional kantor KPU Bantul.

"Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, maka anggaran di KPU Bantul pada 2025 itu hanya ada anggaran honor dan operasional kantor KPU Bantul," kata Ketua KPU Bantul, Joko Santosa di kantornya, Rabu (26/2).

Operasional kantor KPU Bantul yang dimaksud hanya untuk biaya penggunaan listrik, air, dan telepon. Bahkan, penggunaannya pun dibatasi. Pasalnya, anggaran operasional kantor KPU Bantul telah dipangkas sekitar 50 persen.

"Jadi, misal setiap pukul 16.00 WIB, lampu, AC, dan sebagainya harus mati. Karena itu sudah jadi kebijakan baru," tutur Joko.

Artinya, anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih pemula maupun sosialisasi sejenisnya sudah tidak ada. Padahal pada tahun 2025, pihaknya berencana menggelar program pendidikan pemilih tersebut.

"Maka, untuk program (pendidikan pemilih) itu nanti kami serahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul. Karena selama ini, (menggunakan anggaran) Pemkab Ban-

tul dengan anggaran KPU," papar Joko.

Selain itu, mobil dinas untuk komisioner KPU Bantul sekarang tidak ada lagi. Dengan begitu, Joko menyebut bahwa para komisioner KPU Bantul tidak lagi bekerja dengan menggunakan fasilitas mobil dinas.

"Mobil itu sudah kami kembalikan semuanya per Januari 2025. Jadi, sehari-hari pakai kendaraan pribadi. Uang bensin juga tidak ada," ucapnya.

Tak hanya sampai di sini, agenda kunjungan ke luar kota juga telah dihapus termasuk kegiatan pembekalan di hotel sudah tidak diterapkan selama tahun 2025. Padahal sebenarnya, setelah penetapan bupati dan wakil bupati Bantul terpilih 2024 ini, KPU masih ada beberapa kegiatan.

"Misalnya pengosongan kotak suara dan lelang. Jadi, ya nanti untuk lelang mungkin lewat *zoom meeting*," kata dia.

Joko melanjutkan, sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, pihaknya dituntut untuk kreatif dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak menggunakan anggaran. Pihaknya sedang mencari alternatif lain untuk menjalankan beberapa program yang telah direncanakan.

"Sebisa mungkin kami kreatif, agar mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak menggunakan anggaran," tandasnya. (nei)